

**DAMPAK DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

(Tesis)

Oleh

**ATIKA RINI
NPM 2120051001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DAMPAK DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh

Atika Rini

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang menggunakan data sekunder anggaran dana desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2016-2022. Tujuan penelitian meliputi: menganalisis tingkat efektivitas penggunaan dana desa, mengkaji hubungan antara anggaran dana desa dengan IDM, dan menilai dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio efektivitas, analisis data panel, dan analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang sangat tinggi, dengan rata-rata rasio aktivitas sebesar 99,41% selama periode penelitian. Analisis data panel mengungkapkan bahwa anggaran dana desa berpengaruh signifikan terhadap IDM, menunjukkan hubungan positif antara keduanya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dana desa memiliki dampak positif terhadap pengembangan wilayah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur yang dibangun, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas terhadap layanan publik, sementara program pemberdayaan ekonomi telah meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

Kata kunci: analisis data panel, dana desa, indeks desa membangun (IDM), pengembangan wilayah, rasio efektivitas

ABSTRACT

IMPACT ANALYSIS OF VILLAGE FUNDS ON REGIONAL DEVELOPMENT IN TULANG BAWANG REGENCY

By

Atika Rini

This study aims to analyze the impact of Village Funds on regional development in Tulang Bawang Regency using secondary data on Village Fund budgets and the Village Development Index (IDM) from 2016-2022. The objectives of the research include: analyzing the effectiveness of Village Fund utilization, examining the relationship between Village Fund budgets and IDM values, and assessing the impact of Village Funds on regional development. The research methods used are effectiveness ratio analysis, panel data analysis, and descriptive analysis. The results show that the effectiveness of Village Fund utilization in Tulang Bawang Regency is very high, with an average activity ratio of 99.41% over the study period. Panel data analysis reveals that Village Fund budgets have a significant impact on IDM, indicating a positive relationship between the two. Additionally, this study finds that Village Funds have a positive impact on regional development, particularly in the construction of basic infrastructure, economic empowerment of the community, and improved access to education and health services. The infrastructure built, such as roads, bridges, and irrigation channels, has enhanced inter-regional connectivity and accessibility to public services, while economic empowerment programs have increased the income and economic independence of the local community.

Keywords: effectiveness ratio, panel data analysis, regional development, Village Development Index, village funds

**DAMPAK DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh

ATIKA RINI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Pada**

**Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **DAMPAK DANA DESA TERHADAP
PENGEMBANGAN WILAYAH DI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

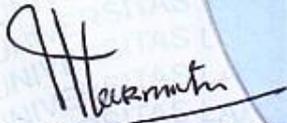
Nama Mahasiswa : **Atika Rini**

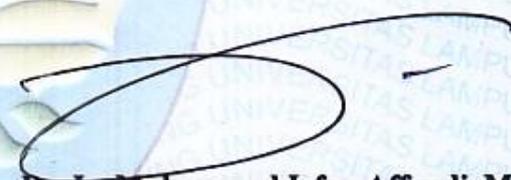
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120051001

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

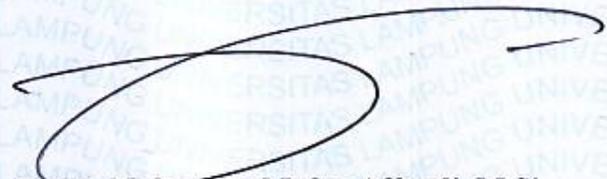
Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin




Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.
NIP. 196211201988032002


Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

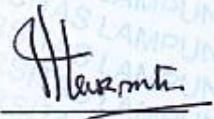
2. **Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Lampung**


Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

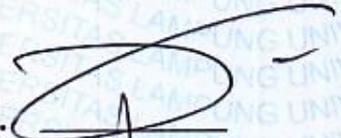
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.



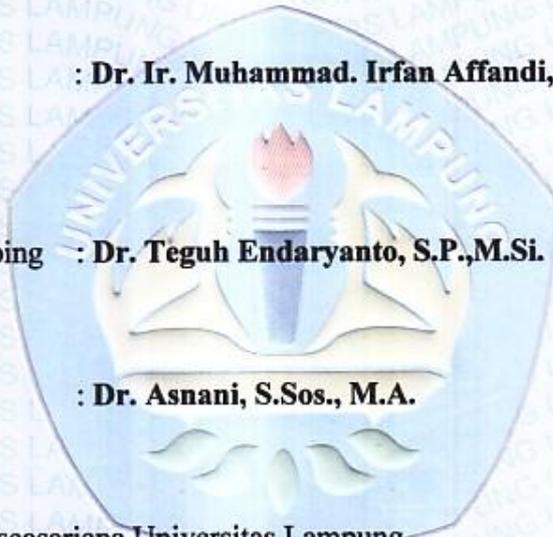
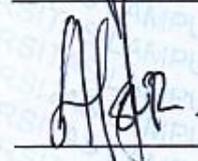
Sekretaris : Dr. Ir. Muhammad. Irfan Affandi, M.Si.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.**



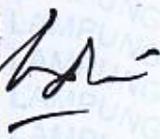
Anggota : Dr. Asnani, S.Sos., M.A.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 19 Juli 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“DAMPAK DANA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,

Yang membuat pernyataan,



Atika Rini

NPM. 2120051001

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur kupersembahkan karya ini untuk mereka yang selalu menjadi sumber inspirasi dan dukungan dalam perjalanan penulisan tesis ini

kedua orangtua, para dosen, suami, keluarga, dan para sahabat

Akhirnya, kepada Sang Pencipta segala yang ada, atas rahmat dan petunjuk-Nya yang melimpah dalam setiap langkah perjalanan ini.

Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 24 Juni 1993, merupakan anak terakhir dari empat bersaudara pasangan Bapak A. Haikal Salim dan Ibu dra. Rahmiyati Ahadis. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan pada tahun 1998, Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kelapa Tujuh Lampung Utara pada tahun 1999-2005. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 7 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2005-2008, dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2008-2011. Penulis diterima di Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri di Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2021 penulis kembali melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung. Penulis pernah bekerja di Adidas Indonesia dan Shopee Indonesia pada kurun waktu 2016-2020. Saat ini penulis bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Dampak Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tulang Bawang” dengan baik.

Banyak pihak yang telah memberikan doa, bantuan, nasihat, motivasi dan saran yang membangun dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dan selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, pengarahan, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Ktut Murniati M.T.A, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, pengarahan, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P. (Alm) selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak bertukar pikiran dan memberika masukan hingga tesis ini dapat mulai tersusun.
6. Bapak Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si., sebagai Dosen Penguji Pertama atas saran, kritik, dan arahan yang diberikan untuk perbaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Anani, S.Sos., M.A., sebagai Dosen Penguji Kedua atas saran, kritik, dan arahan yang diberikan untuk perbaikan tesis ini.

8. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menjadi mahasiswi, serta staf/karyawan yang memberikan bantuan dan kerjasamanya selama ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu (Rahmiyati Ahadis) dan Ayah (Haikal Salim) dan suami (Aditya Yusuf) yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa restu, kasih sayang, perhatian yang tak pernah terputus,, serta keluarga besar atas semua limpahan kasih sayang, doa, nasihat, semangat, kebahagiaan, dan perhatian yang tak pernah putus kepada penulis selama ini.
10. Terimakasih kepada para sahabat yang selalu memberikan dukungan, Laila ‘colay’ Anisa yang selalu membersamai perjalanan magister ini.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas semangat berjuang dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis hingga terselesaikan tesis ini.

Bandar Lampung,

Penulis,

Atika Rini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran.....	34
III. METODE PENELITIAN	37
A. Metode Dasar Penelitian	37
B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional.....	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber data.....	40
E. Validasi Data.....	41
F. Metode Analisis	42
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang	50
B. Potensi Pengembangan Wilayah	56
C. Organisasi Pemerintah Desa	63
D. Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah	64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang	73

B. Hubungan antara Dana Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tulang Bawang	76
C. Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tulang Bawang	84
V. KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang.....	14
2. Penelitian terdahulu.....	28
3. Jenis dan sumber data penelitian.....	40
4. Klasifikasi pengukuran efektivitas.....	43
5. Wilayah Administrasi Kabupaten Tulang Bawang.....	54
6. Penerimaan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang.....	65
7. Prioritas penggunaan dana desa.....	67
8. Rasio efektivitas dana desa Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016-2022.....	74
9. Penerimaan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang.....	77
10. Nilai dan status indeks desa membangun Kabupaten Tulang Bawang.....	79
11. Pendekatan regresi data panel.....	80
12. Hasil estimasi uji chow.....	81
13. Hasil estimasi uji hausman.....	81
14. Hasil estimasi Fixed Effect Model.....	82
15. Nilai dan status indeks desa membangun Kabupaten Tulang Bawang.....	97
16. Nilai dan status indeks desa membangun Kabupaten Mesuji.....	98
17. Nilai dan status indeks desa membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	98
18. Pembangunan sarana prasarana desa di Kabupaten Tulang Bawang.....	101
19. Penetapan Dana Desa di Kabupaten Tulang Bawang.....	121
20. Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulang Bawang Setiap Desa.....	129
21. Uraian Pekerjaan Program Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang.....	135
22. Indikator penilaian IDM.....	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. IDM Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016	5
2. IDM Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022	6
3. Peta administratif Kabupaten Tulang Bawang.....	53
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Tulang Bawang	64
5. Peta sebaran IDM Tulang Bawang Tahun 2016	87
6. Peta sebaran IDM Tulang Bawang Tahun 2017	87
7. Peta sebaran IDM Tulang Bawang Tahun 2018	89
8. Peta sebaran IDM Tulang Bawang Tahun 2019	90
9. Peta sebaran IDM Tulang Bawang Tahun 2020	91
10. Peta sebaran IDM Tulang Bawang Tahun 2021	92
11. Peta sebaran IDM Tulang Bawang Tahun 2022	93
12. Grafik IDM Kecamatan di Tulang Bawang	95
13. Pembangunan sanitasi di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru	104
14. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Dente Teladas dan Penawartama	105
15. Desa Sungai Burung di Kecamatan Dente Teladas.....	107
16. Transportasi di Sungai Burung.....	108
17. Pembangunan jalan rabat beton dengan dana desa	109
18. Eviews Common Effect Model.....	118
19. Eviews Fixed Effect Model.....	118
20. Eviews Random Fixed Effect Model	119
21. Eviews Uji Chow	119
22. Eviews Uji Hausman.....	120

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menilik dari konsep pembangunan wilayah (*regional development concept*), pendekatan kawasan dan pembangunan kawasan telah diterapkan secara luas. Pembangunan menggunakan pendekatan kawasan telah dikembangkan secara luas sejak beberapa dekade yang lalu. Pendekatan kawasan meliputi pembangunan berbagai sektor yang saling terkait dan menunjang satu sama lainnya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi tertentu, pada suatu permukaan wilayah dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Pembangunan merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena penduduk makin bertambah besar jumlahnya, seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan juga pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses perubahan yang disusun secara sengaja dan terencana untuk mencapai situasi yang salah satunya terdapat proses perencanaan. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan (Adisasmita, 2011). Dalam perkembangannya pembangunan pedesaan yang telah banyak dilakukan sejak dahulu hingga sekarang, belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dimana pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi

juga sebagai subyek pembangunan (Muta'Ali, Pengembangan Wilayah Perdesaan, 2016).

Menilik *nawacita* ketiga dari prioritas pembangunan nasional pemerintah saat ini, yaitu *“Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”*. Desentralisasi di Indonesia telah berkembang hingga ke tingkat desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dengan disahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dengan ini desa menjadi satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Desentralisasi desa dilakukan sebagai bentuk pengakuan terhadap entitas desa yang telah ada sebelum pemerintahan RI, serta untuk mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Desa. Pemerintah desa dinilai akan lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat desa mereka dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Syarat pembentukan desa tercantum pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 8; batas usia desa induk minimal lima tahun; wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah; Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat; Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya. Terdapat beberapa sumber pendapatan desa yang dijelaskan yaitu Pendapatan asli desa; dana desa yang bersumber dari APBN; bagian dari hasil PDRD Kab/kota; alokasi dana desa dari

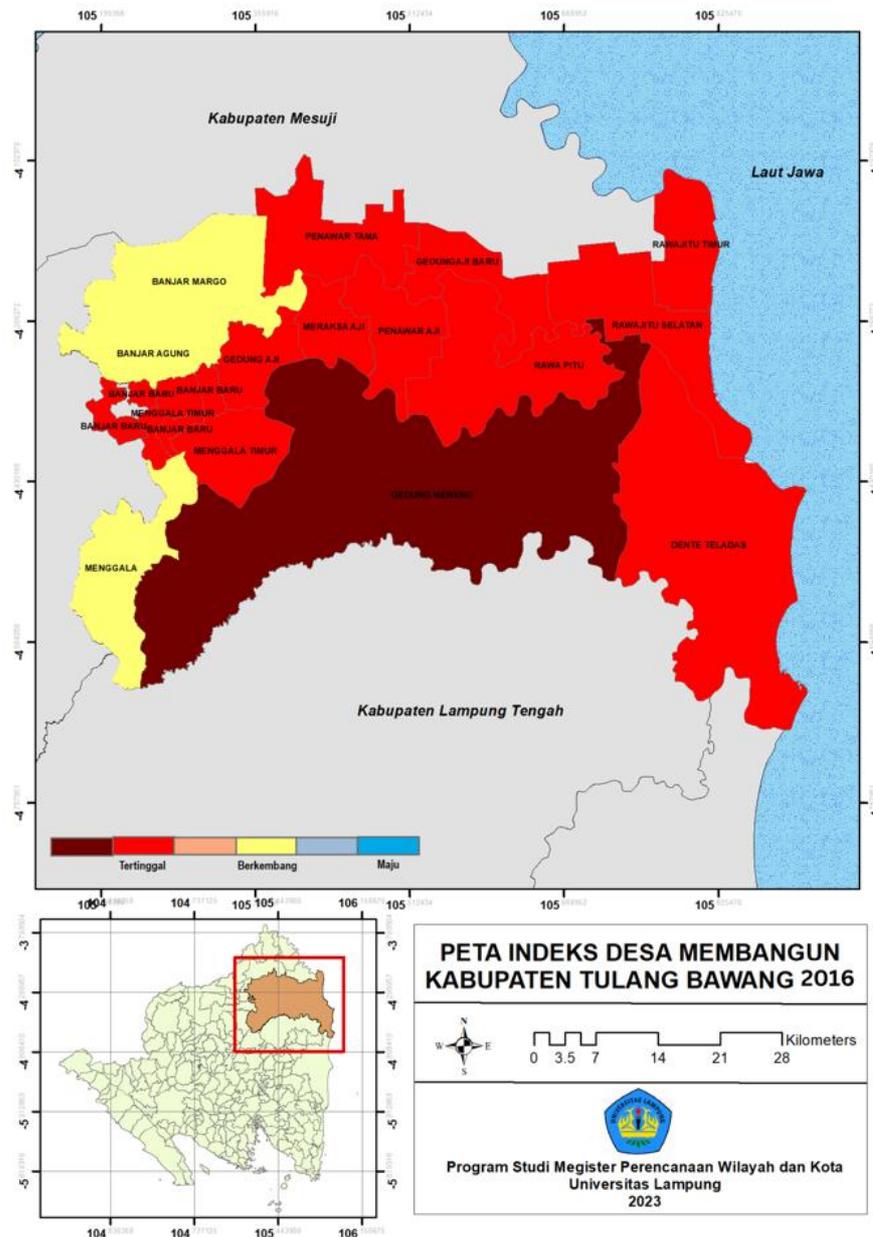
Kab/Kota; Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota; hibah dan sumbangan pihak ke-3; serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa (DD) adalah salah satu wujud untuk membantu berjalannya desentralisasi tingkat desa. Pada dasarnya penggunaan dana desa yang berasal dari APBN ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan dana desa wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah telah memberikan panduan tentang bagaimana dana desa dimanfaatkan, diantaranya melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pemanfaatannya; bidang kegiatan yang boleh dilaksanakan menggunakan anggaran dana desa, serta ukuran-ukuran yang perlu dicapai. Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Pembagian dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa) (Mulyani, 2017)

Tingkat kemandirian desa ditentukan dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama dengan nilai IDM kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907; Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya dengan nilai IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907; Desa Berkembang atau Desa Madya dengan nilai IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989; Desa Maju atau Desa Pra-Sembada dengan nilai IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072; Desa Mandiri atau Desa Sembada dengan nilai IDM lebih besar ($>$) dari 0,8155.

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 3.466,22 km memiliki 15 Kecamatan dengan 147 Kampung dan 4 Kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu daerah yang menunjukkan kemajuan pada pengembangan wilayah sejak bergulirnya program dana desa. Pada Tahun 2016 IDM Kabupaten Tulang Bawang memiliki nilai 0,5674 dengan status tertinggal dan memiliki 1 kecamatan sangat tertinggal, 11 kecamatan tertinggal, dan 3 kecamatan berkembang.



Gambar 1. IDM Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016

Tahun 2022 telah mengalami banyak perubahan dengan IDM Kabupaten bertambah menjadi 0,6886 dengan status berkembang dan tanpa memiliki kecamatan dengan status tertinggal maupun sangat tertinggal. Saat ini Kabupaten Tulang Bawang 11 kecamatan berkembang dan 4 kecamatan dengan status IDM maju.

423,7 kilometer, 17 unit pasar, dan 419 unit sumur bor. Selain infrastruktur desa, dana desa juga dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan masyarakat desa.

Dana desa diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang. Dampak positif tersebut antara lain, peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, peningkatan ekonomi desa, dan peningkatan daya saing desa. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat dampak positif dana desa terhadap pengembangan wilayah. Permasalahan tersebut antara lain, masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan masih tingginya angka kemiskinan di desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana desa terhadap peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, peningkatan ekonomi desa, dan peningkatan daya saing desa. Pada penelitian ini IDM menjadi salah satu tolak ukur dimana terdapat 51 penilaian yang mewakili pembangunan desa, apakah terdapat kenaikan indeks seiring bergulirnya dana yang diterima oleh desa.

B. Rumusan Masalah

Program dana desa diharapkan dapat memberikan pemerataan pembangunan dimana penggunaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan. Menilik dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tulang Bawang sejak awal bergulirnya program dana desa hingga saat ini mengalami perubahan positif namun dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa permasalahan. Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana pengaruh antara anggaran Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulang Bawang?

3. Bagaimana dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dana desa (DD) terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang dan secara khusus yaitu:

1. Menganalisis tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Menganalisis hubungan antara anggaran Dana Desa terhadap nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Menganalisis dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui apakah pembangunan yang bersumber dari dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program terkait dana desa dan memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efektif dan transparan.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa dan pembangunan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut di-nyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*). Secara filosofis diakui bahwa setiap individu memiliki aspirasi yang dinamis. Satu tujuan tercapai muncul aspirasi yang lain. Peningkatan pendidikan, pendapatan akan menimbulkan aspirasi yang lain, dan ini semua adalah pembangunan. Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur (Mahi & Trigunarso, 2017).

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur suatu yang belum ada. Pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (*sustenance*) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self-esteem*) serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir, 2002). Dalam strategi pembangunan wilayah aspek-aspek pokok yang penting dipecahkan adalah: di daerah-daerah mana serangkaian pembangunan selayaknya dijalankan. Untuk beberapa proyek letak daerahnya sudah khusus dan tidak dapat lagi dipindahkan, seperti proyek bendungan untuk tenaga listrik dan irigasi, proyek pertambangan dan sebagainya.

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya masyarakat Indonesia, pembangunan daerah perlu dipacu secara bertahap. Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional haruslah dilakukan koordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di daerah lain.

Sebelum suatu daerah menyusun berbagai langkah-langkah dalam pembangunan daerahnya dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyek- proyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun.

Dalam mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur telah dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada terwujudnya cita-cita tersebut. Pembangunan daerah yang merupakan rangkaian yang utuh dari pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir telah mulai menunjukkan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan kinerja dari daerah tersebut. (Sukirno, 2000), mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu: proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Rostow proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut, maka lima tahapan tersebut (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011) yaitu :

- a. Masyarakat tradisional (*The traditional society*).
- b. Prasyarat lepas landas (*The precondition for take-off*).
- c. Lepas landas (*The take-off*).
- d. Gerakan kearah kedewasaan (*The drive to maturity*) .
- e. Masa konsumsi tinggi (*The age of high mass consumption*)

Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Pembangunan yang menerapkan pendekatan kawasan dilihat dari segi luas wilayah perencanaannya mungkin saja lebih kecil dan mungkin pula lebih besar dari suatu wilayah kabupaten, tetapi harus memiliki fungsi tertentu, dengan demikian tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran pembangunannya akan lebih tinggi, karena fungsinya tertentu maka sasaran dan tujuan pembangunannya relative lebih terfokus. Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat didefinisikan dan

dianalisa dengan seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011)

2. Desentralisasi Desa

Desentralisasi merupakan konsep penting dalam pengelolaan pemerintahan dan administrasi publik, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau entitas yang lebih lokal. Konsep ini telah mendapatkan perhatian luas dalam literatur akademik karena potensinya dalam meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Menurut Rondinelli dan Cheema (1983), desentralisasi dapat dibagi menjadi empat tipe utama: desentralisasi administratif, desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi. Desentralisasi administratif berfokus pada pemindahan tanggung jawab manajerial dan operasional kepada unit-unit yang lebih rendah, sementara desentralisasi politik menekankan pentingnya demokratisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Desentralisasi fiskal melibatkan distribusi sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan alokasi yang lebih efisien dan adil, dan desentralisasi ekonomi mendorong keterlibatan sektor swasta dan pasar dalam penyediaan layanan publik. Banyak studi menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat pembangunan lokal, tetapi juga menghadapi tantangan seperti ketidakmerataan kapasitas daerah, potensi korupsi lokal, dan kesulitan koordinasi antar tingkatan pemerintahan (Smoke, 2003; Bardhan, 2002). Oleh karena itu, implementasi desentralisasi memerlukan desain kebijakan yang hati-hati dan monitoring yang efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada tahun 2014 desentralisasi dilakukan lebih jauh hingga ke tingkat desa melalui Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. Melalui aturan tersebut, desentralisasi fiskal menjangkau hingga ke tingkat pemerintahan desa melalui program dana desa yang bersumber dari APBN. Undang-Undang Nomor 6/2014

tentang Desa merupakan perangkat untuk mewujudkan desentralisasi melalui pemberian lebih banyak kewenangan terhadap Pemerintahan Desa untuk lebih mandiri atas pengelolaan program dan anggaran (Antlov & Dharmawan, 2016)

Dalam desentralisasi desa, desa berwenang membuat perencanaan sendiri dan berhak menerima alokasi dana untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan yang kewenangannya dikelola oleh desa. Desentralisasi secara administratif berarti adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dasar antara pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi seperti nasional maupun daerah terhadap pemerintah Desa.

Sebagai acuan dalam menjalankan kewenangan Desa atas kebijakan di wilayahnya, Pemerintah desa mengacu pada dokumen RPJMDesa. Berbeda dengan RPJMD Provinsi maupun RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan penurunan dari RPJM Nasional, RPJMDesa disusun berdasarkan prakarsa desa dan menjadi sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, melalui akomodasi Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan program yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa (UU no. 6/2014 tentang Desa). Desentralisasi Desa secara politis berarti pemberian kewenangan termasuk kewenangan untuk melakukan pemilihan langsung terhadap lembaga eksekutif desa (Kepala Desa) dan BPD sebanyak maksimal 3x6 tahun masa jabatan (Antlov, 2002) Kewenangan Desa berdasarkan asas, kedudukan, dan model pembangunan menurut UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang

Payung Hukum	UU No 32. Tahun 2004	UU no 6 Tahun 2014
Asas Utama	Desentralisasi- residualitas	Rekognisi-Subsidaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintah yang berada dalam system pemerintahan Kabupaten/Kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self-government</i> .
Posisi dan Peran Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Posisi Desa	Objek	Subjek
Model Pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>

Desentralisasi desa secara fiskal ditandai dengan adanya pengalihan anggaran intra pemerintahan untuk mencapai keseimbangan fiskal, yaitu dengan memastikan ada anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan pada berbagai tingkatan. Pengalihan dapat berupa pengalihan anggaran atau pengalihan tanggung jawab pembiayaan kegiatan antara pemerintahan pada tingkat yang berbeda. Karakteristik mendasar dalam hal desentralisasi anggaran yang baik adalah adanya anggaran yang diberikan yang memiliki stabilitas dalam besarnya dan fleksibilitas dalam pemanfaatannya. Mekanisme transfer bisa berupa *fixed*, yaitu besaran tetap bagi seluruh daerah; *Ad Hoc*, atau disesuaikan

berdasarkan kebutuhan atau permintaan; dan Formulasi, yaitu berdasarkan kondisi wilayah penerima anggaran.

3. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. IDM disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Terdapat total 50 Indikator dan desa diberi skor berdasarkan pemenuhan.

Tujuan dari penyusunan Indeks Desa Membangun terdiri dari 2 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

- a. Sebagai basis data (*base line*) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
- b. Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Sebagai masukan dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
- d. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, terdapat 3 komponen ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun, yaitu:

- a. Komponen Indeks Desa Membangun;
- b. Status kemajuan dan kemandirian desa; dan
- c. Penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

1. Desa Mandiri (Sembada):

Yaitu desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunanm Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosek dan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.

2. Desa Maju (Pra-Sembada):

Yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosek dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.

3. Desa Berkembang (Madya):

Yaitu desa yang berpotensi menjadi Desa Maju, yang potensi sumber daya sosek dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

4. Desa Tertinggal (Pra-Madya):

Yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosek dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

5. Desa Sangat Tertinggal (Pratama):

Yaitu desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosek dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Setiap indikator penilaian IDM diberikan skor antara 0 sampai dengan 5. Skor yang semakin tinggi mencerminkan tingkat keberartian pada setiap indikator.

4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk Pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan penganggaran dananya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan Jumlah penduduk, Angka kemiskinan, Luas wilayah, dan Tingkat kesulitan geografis.

Adapun tujuan dari diselenggarakan dana desa adalah: meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana desa terdiri atas dua jenis anggaran, yaitu anggaran yang bersifat tetap, alokasi dana dasar, dan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi desa, alokasi dana formula, sebagai alat untuk pemerataan dan upaya pengentasan kemiskinan. Dana formula diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kemandirian desa yang ditentukan berdasarkan nilai desa pada ukuran indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan Kementerian PDPT.

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Sumber pendapatan Desa, menurut UU No. 6/2014 Tentang Desa, seperti terdapat pada pasal 72 ayat 1, pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Dana Desa dari APBN;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%);
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum);
- e. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kab/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

- b. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
- f. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Adapun pengelolaan keuangan Desa tersebut meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas-asas:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dana desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan:

- A. Sarana Prasarana Desa
 - a. Lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;
 - b. Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu;
 - c. Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik;
 - d. Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.
- B. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar
 - a. Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes;
 - b. Pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa.
- C. Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak;
 - b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.
- D. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b. Penanganan bencana alam;
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. Pelestarian lingkungan hidup.
- E. Sarana Prasarana lainnya

Penggunaan dana desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan sistem informasi Desa
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang: Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan anak, Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
- f. Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- h. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- i. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- j. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

5. Pengembangan Wilayah

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Pengembangan wilayah (*Regional Development*) adalah upaya Untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat

dinamis. Komponen- komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu (Rustiadi, et al, 2011).

Pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi alam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Terdapat pendekatan dalam pengembangan wilayah yaitu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah. Pendekatan tersebut dapat bersifat sektoral, spasial, atau integratif:

- a. Pendekatan sektoral adalah pendekatan yang menekankan pada pembangunan sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, industri, atau pariwisata. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- b. Pendekatan spasial adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan wilayah secara spasial, seperti pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, jaringan transportasi, atau sistem jaringan energi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan konektivitas antar wilayah.
- c. Pendekatan integratif adalah pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dalam mengembangkan suatu wilayah, ada 2 faktor yang menyebabkan wilayah tersebut bisa berkembang (Muta'Ali, Pengembangan Wilayah Perdesaan, 2016) yaitu :

- a. Faktor Internal terdiri dari potensi wilayah yang berupa Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Buatan (SDB).

- b. Faktor Eksternal dari globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara, faktor eksternal ini membutuhkan ruang dan prasarana wilayah untuk dapat memanfaatkan lahan yang terbatas agar dapat berkembang dengan baik.

Berikut adalah beberapa pendekatan yang ada di konsep pengembangan wilayah:

- a. Pendekatan pertumbuhan adalah pendekatan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pendekatan ini menggunakan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, inovasi, dan perdagangan.
- b. Pendekatan pemerataan adalah pendekatan yang menekankan pada pemerataan pembangunan antar wilayah. Pendekatan ini menggunakan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Pendekatan berkelanjutan adalah pendekatan yang menekankan pada pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan berbagai kebijakan dan program untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan konservasi alam.

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah, kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah yang bersangkutan, serta merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan suatu negara wilayah itu sendiri dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik

tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011).

Dalam implementasinya di daerah, konsep pengembangan kawasan strategis ekonomi seperti kawasan andalan dan kawasan ekonomi terpadu tidak secara efektif dikembangkan sehingga tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Tantangan kedepan adalah mengupayakan pengelolaan jalannya pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi wilayah, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga menjadi kekuatan pendorong utama dalam melaksanakan pembangunan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Muta'Ali, Pengembangan Kawasan Strategi Ekonomi, 2015).

Dengan memahami konsep pengembangan wilayah diharapkan para perencana dalam melakukan pendekatan dengan lebih memperhatikan komponen-komponen penyusunan wilayah tersebut yang saling berinteraksi dan mengkombinasikan potensi dari masing-masing komponen sehingga tercipta suatu strategi pembangunan dan pengembangan wilayah yang baik dan terarah. Pemilihan pendekatan yang tepat dalam pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah tersebut. Pendekatan yang tepat dapat membantu mencapai tujuan pengembangan wilayah secara efektif dan efisien.

6. Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Efektivitas penggunaan dana desa merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Efektivitas penggunaan dana desa dapat diartikan sebagai sejauh mana dana desa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis rasio efektivitas penggunaan dana desa merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa. Analisis rasio efektivitas penggunaan dana desa dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input dana desa.

Output dana desa merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dana desa. Output dana desa dapat berupa infrastruktur desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan lain-lain. Input dana desa merupakan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dana desa. Input dana desa dapat berupa tenaga kerja, bahan baku, dan dana. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin efektif penggunaan dana desa.

pengukuran efektivitas penggunaan dana desa hanya sebatas rasio, tanpa membahas secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dana atau dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Analisis terbatas pada data kuantitatif mengenai rasio penyerapan dan alokasi dana desa dalam konteks program yang telah direncanakan, serta membandingkan pencapaian target yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh.

7. Hubungan Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

Hubungan antara anggaran dana desa terhadap nilai indeks desa membangun telah menjadi salah satu topik penelitian yang menarik untuk dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran dana desa memiliki pengaruh positif terhadap nilai indeks desa membangun. Peningkatan anggaran dana desa dapat meningkatkan nilai indeks desa membangun melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Peningkatan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, dan sarana sanitasi;
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat desa terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi;
- c. Peningkatan produktivitas masyarakat desa;
- d. Peningkatan nilai ekonomi desa;
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

Peningkatan anggaran dana desa dapat meningkatkan nilai indeks desa membangun melalui berbagai cara, antara lain Peningkatan infrastruktur desa, peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, peningkatan produktivitas masyarakat

desa, peningkatan nilai ekonomi desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, perlu diingat bahwa pengaruh anggaran dana desa terhadap nilai indeks desa membangun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa, dan kondisi geografis dan sosial budaya desa.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dana desa dalam meningkatkan indeks desa membangun, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan memperhatikan kondisi geografis dan sosial budaya desa.

8. Analisis Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Selain itu, regresi data panel juga digunakan untuk melakukan peramalan variabel respon pada setiap sektor yang ada. Namun, untuk meramalkannya, perlu dilakukan peramalan terlebih dahulu untuk variabel prediktornya pada masing-masing sektor.

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain (Widarjono, 2009):

1) Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

2) Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan perbandingan dan acuan dasar dalam memperoleh informasi tambahan mengenai penelitian saat ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini tidak terlepas dari topik penelitian mengenai Dana Desa dan pengembangan wilayah. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai dana desa dan pengembangan wilayah dengan berbagai metode penelitian diantaranya regresi data panel, *shift share (SS)*, *location Quotient (LQ)*, regresi data panel, regresi linier berganda. Dengan lokasi dan objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian kali ini akan menggunakan metode regresi data panel untuk melihat hubungan dana desa terhadap indeks desa membangun dan metode shift share (SS) untuk mengetahui apakah terdapat pergerakan perekonomian sejak bergulir dana desa. Kurun waktu untuk penelitian yaitu 2016-2022 dengan 147 desa sebagai objek penelitian. Berdasarkan Tabel 2, tinjauan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam hal metode, waktu, dan tempat penelitian.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Dewi, 2021)	Analisis Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Klaten	Mengetahui bagaimana pengaruh hubungan antara Dana Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) dan dampaknya terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten.	Regresi data panel	Pada pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) terbukti bahwa model terestimasi eksis dengan nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0,6515, artinya sebesar 65,15% variabel perubahan IDM dipengaruhi oleh variabel Dana Desa, sedangkan sisanya sebesar 34,85% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan uji validasi diketahui bahwa secara parsial variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap IDM. Berdasarkan Uji F secara simultan variabel Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).
2	(Gantara & Achmadi, 2012)	Model Pengembangan Wilayah untuk Pembangunan	Mengetahui sektor unggulan di tiap-tiap kabupaten Jawa Timur Selatan dan menentukan dimensi panjang dermaga pelabuhan di daerah Pantai Selatan Jawa	<i>Location Quotient</i> (LQ) dan <i>Shift Share</i>	Dari hasil perhitungan analisis yaitu LQ dan Shift Share, maka dapat dilihat bahwa Sektor Pertanian, Pertambangan,

Tabel 2 Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Pelabuhan: Studi Kasus Pantai Selatan Jawa Timur	Timur.	(SS)	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa merupakan sektor potensial. Biaya transportasi distribusi muatan ekspor dari Pelabuhan Tanjung Wangi ke Benoa yang paling minimum adalah Rp 16.350.021 dengan DWT 1050 ton dan biaya angkut per ton sebesar Rp 15.571. Dengan BOR pelabuhan sebesar 85.57%, maka panjang dermaga yang dibutuhkan sebesar 573 meter
3	(Ghassani, Priyarsono, Rindayati, & Seminar, 2022)	Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: pendekatan teori kelembagaan	menganalisis faktor penghambat ditinjau berdasarkan perspektif kelembagaan yang menghambat proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan wilayah perdesaan	Pendekatan kualitatif dengan analisis isi (<i>content analysis</i>) dan analisis tematik (<i>thematic analysis</i>)	Faktor yang menghambat tercapainya pembangunan wilayah perdesaan ditinjau berdasarkan perspektif kelembagaan rendahnya tingkat kultural- kognitif masyarakat desa dalam memahami prioritas kebutuhan jangka panjang, sehingga berdampak pada tidak idealnya alokasi belanja dana desa. Selain itu tingginya individualitas masyarakat di

Tabel 2 Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Desa Y dan Z menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat baik secara emosional maupun fisik sehingga masyarakat hanya berperan sebagai objek pembangunan saja.
4	(Arfiansyah, 2020)	Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah	mengetahui pengaruh dari dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.	regresi data panel	Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkat dana desa akan menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkat pertumbuhan ekonomi semakin menurun kemiskinan.
5	(Arina, Masinambow, & Walewangko, 2021)	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara	mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun secara simultan di Kabupaten Minahasa Tenggara baik secara simultan maupun parsial.	regresi linier berganda	Secara Simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara parsial Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Secara parsial Alokasi Dana

Tabel 2 Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
6	(Suhyanto, Juanda, Fauzi, & Rustiadi, 2020)	Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat	menganalisis pengaruh pendapatan daerah berupa dana transfer (DAU, DBH dan DAK), Dana Desa dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM, dan menganalisis pendapatan daerah yang pengaruh totalnya paling tinggi terhadap IPM	regresi data panel model <i>fixed effect</i> .	Semua dana transfer berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga dengan pendapatan asli daerah dan dana desa. Pendapatan daerah yang pengaruh totalnya paling besar terhadap IPM secara berurutan adalah DAU, PAD, dan DAK
7	(Sari & Abdullah, 2017)	Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung	Menganalisis perbedaan kemiskinan desa di Kab Tulungagung antara tahun 2015 dan 2016 dan menganalisis ADD terhadap kemiskinan desa di Kab Tulungagung tahun 2015-2016	Regresi berganda dengan data panel	Terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016, variabel yang digunakan dalam model yaitu Dana Desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan desa dengan nilai masing-masing -4,52 untuk Dana Desa dan -1,52 untuk ADD. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R ²) adalah 0,99 atau 99%, ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel

Tabel 2 Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Dana Desa dan ADD dalam menjelaskan kemiskinan desa adalah sebesar 99%.
8	(Hadiwibowo, Dokhi, Hidayat, & Johantri, 2022)	Peran Desa Dalam Perekonomian: Analisis Hubungan Indeks Desa Membangun, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto	menganalisis peran desa dalam perekonomian	Regresi data panel	Hasil analisis menunjukkan bahwa pendanaan, kualitas pembangunan desa, dan kualitas pembangunan manusia memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.
9	(Sundaro & Sudrajat, 2019)	Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Mengidentifikasi arah pengembangan wilayah Kota Semarang Berdasarkan Potensi (Sektor) Unggulan Kota Semarang.	<i>Location Quotien</i> (LQ), <i>Typologi Klassen</i> , <i>Shift Share</i> (SS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 sektor perkeonomian di Kota Semarang yang merupakan sektor basis (unggulan). Analisis <i>Typologi Klassen</i> teridentifikasi bahwa hanya terdapat 1 sektor yang masuk dalam kategori sektor maju dan tumbuh cepat (kuadran I), sepuluh sektor masuk dalam kategori sektor maju namun

Tabel 2 Lanjutan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					tertekan (Kuadran III) dan 6 Sektor masuk dalam kategori sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Hasil perhitungan analisis <i>Shift Share</i> diketahui komponen pertumbuhan wilayah (N) dan komponen bauran industri (M) bernilai positif sedangkan komponen daya saing (C) semua sektor bernilai negatif kecuali untuk sektor Komunikasi dan Informasi.
10	(Hidayat & Darwin, 2017)	Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti	Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sektor ekonomi dan merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.	<i>Location Quotient (LQ)</i> , <i>Shift Share (SS)</i> , dan Indeks Spesialisasi	Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor potensial berdasarkan analisis gabungan <i>Location Quotient</i> , <i>Shift Share</i> , dan Indeks Spesialisasi adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Sektor Industri Pengolahan. Sektor yang terspesialisasi dalam interaksi antar daerah adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

C. Kerangka Pemikiran

Program Dana Desa (DD) pertama kali digulirkan pada tahun 2016 sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan dan berjalannya desentralisasi desa. Prioritas penggunaan dana desa adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dimaksudkan untuk menunjang sarana prasarana desa diantaranya pembangunan jalan, gedung, fasilitas pendidikan, dan fasilitas Kesehatan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat desa dalam upaya menambah kemampuan memproduksi. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan potensi desa.

Dana Desa (DD) sebagai stimulus untuk mengaktifkan kelembagaan desa. Diharapkan dengan adanya anggaran khusus yang dapat langsung dikelola oleh pemerintah desa dapat menjadikan kelembagaan desa lebih produktif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga desa yang dapat menjadi wadah keberhasilan masyarakat desa.

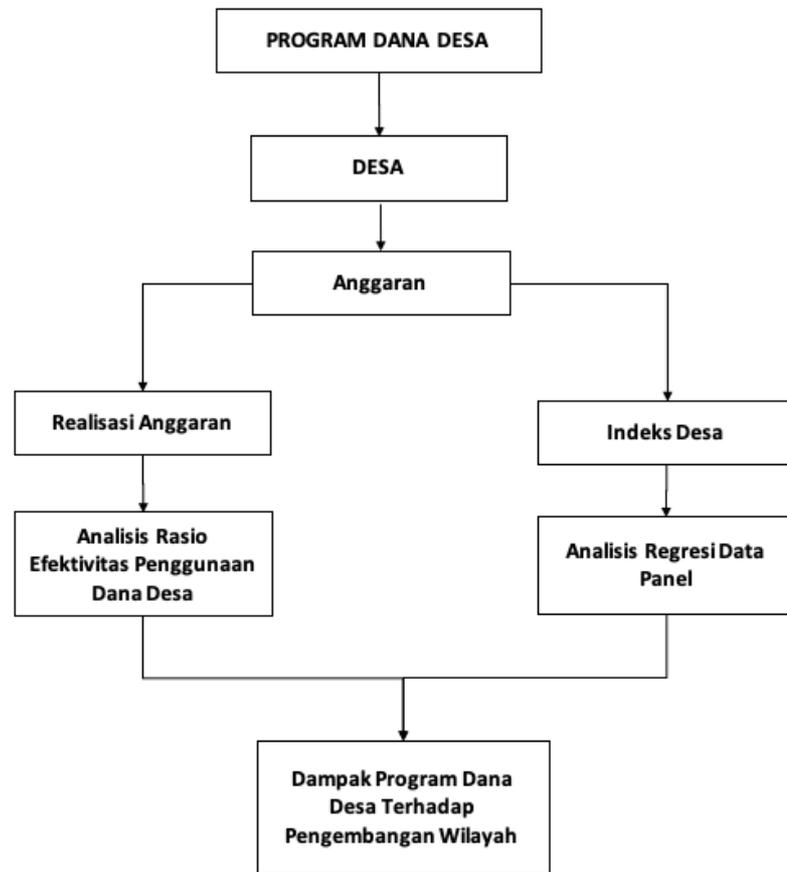
Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 mengatur mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) dimana terdapat lima tingkatan kemajuan dan kemandirian desa. Dalam kurun waktu enam tahun sejak bergulirnya program dana desa (DD) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2016 dari total 15 Kecamatan masih terdapat satu kecamatan dengan status sangat tertinggal. Pada tahun 2022 semua IDM tingkat kecamatan tidak ada lagi status tertinggal. Namun untuk tingkat desa masih menunjukkan beberapa desa dengan status tertinggal.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas program dana desa dengan melihat jumlah anggaran dan jumlah realisasi setiap tahun selama rentan waktu 2016-2022. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dari setiap Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, Pagu

Anggaran dana desa untuk masing-masing Kecamatan, jumlah realisasi anggaran, dan rincian program yang telah terealisasi dari dana desa (DD).

Dari jumlah pagu dan realisasi dana desa akan dilakukan analisis rasio efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif serapan anggaran dana desa. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan regresi data panel dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) dan pagu anggaran. Analisis dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), selanjutnya dilakukan uji *Chow* dan uji *Hausman* untuk menentukan pendekatan mana yang terbaik. Setelah mendapatkan model pendekatan terbaik akan dilakukan uji eksistensi model (uji F) untuk melihat apakah secara simultan variabel dana desa berpengaruh terhadap IDM. Uji selanjutnya adalah koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kedua variabel saling mempengaruhi. Terakhir adalah uji validasi (uji t) untuk mengetahui secara parsial apakah kedua variabel berpengaruh secara signifikan.

Selanjutnya adalah analisis kualitatif dimana akan membahas secara lebih mendetail mengenai kondisi sebelum adanya program dana desa (DD) dan kondisi saat ini dan dampak pembangunan tersebut terhadap pengembangan wilayah. Menganalisa kecamatan mana saja yang telah terjadi percepatan pembangunan dan yang mengalami keterlambatan serta faktor apa saja yang mempengaruhi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran. Untuk dapat lebih memahami dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Kerangka pemikiran penelitian analisis dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif yaitu suatu metode penelitian mengenai gambaran lengkap tentang hal-hal yang berkaitan dengan program dana desa dan pengembangan wilayah. Data pada awalnya dikumpulkan, disusun, diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis rasio efektivitas, dan regresi data panel.

B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup pengertian yang digunakan untuk menunjang dan menciptakan data akurat yang akan dianalisis sehubungan dengan tujuan penelitian. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen- komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan.

Pengembangan wilayah (*Regional Development*) adalah upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan meminimalkan kesenjangan antar wilayah

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan dengan total 50 indikator penilaian. Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa.

Anggaran dana desa terdiri atas dua jenis anggaran, yaitu anggaran yang bersifat tetap, Alokasi Dana Dasar, dan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi Desa, Alokasi Dana Formulasi, sebagai alat untuk pemerataan dan upaya pengentasan kemiskinan. Dana formula diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kemandirian desa yang ditentukan berdasarkan nilai desa pada ukuran indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan Kementerian PDPTT.

Realisasi anggaran adalah jumlah resapan dana desa yang sudah terealisasi sesuai dengan program yang telah disusun untuk setiap tahunnya.

Analisis rasio efektivitas yaitu Teknik pendekatan kuantitatif dengan membandingkan antara realisasi anggaran dan target anggaran. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desanya semakin baik tanpa membahas secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dana atau dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Analisis terbatas pada perbandingan antara realisasi pengeluaran dan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang telah berhasil direalisasikan.

Analisis data panel adalah alat analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Dana Desa) terhadap variabel dependen (Indeks Desa Membangun) dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*.

Dampak program dana desa adalah perbandingan kondisi di wilayah penelitian sebelum dan sesudah bergulirnya program dana desa dengan melihat indikator penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) dan pergerakan perekonomian wilayah.

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang keragamannya atau variabelitasnya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikat adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.

Variabel Bebas (*Independent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel terikat. Pada penelitian ini variabel bebas adalah dana desa.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang Memiliki 15 Kecamatan yang terdiri dari 147 Desa dan 4 Kelurahan. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu wilayah yang menerima alokasi dana desa, sehingga tepat untuk dijadikan objek penelitian guna memahami efektivitas kebijakan ini dalam konteks lokal. Pada tahun awal bergulirnya dana desa Kabupaten Tulang Bawang menjadi salah satu dari 9 Kabupaten/Kota yang masih tertinggal di Provinsi Lampung. Dari total 4 Kecamatan dengan status sangat tertinggal di Provinsi Lampung salah satunya berada di kabupaten Tulang Bawang. Nilai IDM kabupaten Tulang Bawang berada dibawah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang statusnya adalah Kabupaten Pemekarannya.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki beragam karakteristik ekonomi dan sosial yang memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap bagaimana dana desa

mempengaruhi berbagai aspek pengembangan wilayah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan data yang memadai dan aksesibilitas informasi di Kabupaten Tulang Bawang memudahkan proses pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk penelitian ini. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mengawasi penggunaan dana desa memberikan lingkungan yang kondusif untuk menilai efektivitas program ini secara objektif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Kabupaten Tulang Bawang menjadi lokasi yang strategis dan relevan untuk penelitian dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Desember Tahun 2022 hingga Februari Tahun 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data meliputi pengumpulan data sekunder melalui tinjauan pustaka, dan dokumen lainnya sebagai pengetahuan dasar atau landasan teori serta kebutuhan data yang dibutuhkan terkait program dana desa di Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2016-2022. Kebutuhan dan sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis dan sumber data penelitian

Data	Jenis Data	Sumber Data
1 Anggaran Dana Desa	Sekunder	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tulang Bawang
2 Serapan Anggaran Dana Desa	Sekunder	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tulang Bawang
3 Indeks Desa Membangun (IDM)	Sekunder	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Tabel 3 Lanjutan

	Data	Jenis Data	Sumber Data
4	Program Realisasi Dana Desa	Sekunder	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tulang Bawang.
5	Indikator Penilaian IDM	Sekunder	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

E. Validasi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari tiga sumber utama, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berisi penetapan besaran dana desa setiap tahunnya. Peraturan daerah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga dianggap sebagai sumber data yang kredibel dan dapat diandalkan.

Publikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memuat Indeks Desa Membangun (IDM) setiap tahun. Publikasi kementerian merupakan sumber resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan telah melalui proses verifikasi dan validasi internal sebelum diterbitkan. Data ini konsisten dengan data dari BPS dan menunjukkan tren yang logis selama periode 2016-2022.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tulang Bawang untuk data realisasi anggaran dan kegiatan pembangunan dana desa. Data ini berasal dari lembaga resmi pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat kampung, sehingga dianggap dapat diandalkan. Validasi secara langsung juga dilakukan dengan mewawancarai Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tulang Bawang Drs. Yen Dahren, M.AP. mengenai apakah besaran dana desa yang diterima setiap desa sesuai dengan yang ditetapkan di Peraturan Daerah dan mengenai kegiatan pembangunan dari dana desa. Beliau mengatakan bahwa dana desa yang diterima dan daftar kegiatan dapat dipastikan sesuai, hal ini juga didukung dengan laporan pertanggung jawaban setiap tahun yang diberikan pemerintah desa. Pengawasan

selain dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

F. Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, metode ini memungkinkan untuk menyajikan data dalam bentuk cerita atau narasi, yang membantu memahami konteks dan pola yang mungkin tidak terlihat melalui angka-angka saja. Analisis kualitatif berguna untuk menjelaskan latar belakang, situasi, dan proses yang relevan dengan penelitian. metode kedua pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan alat analisis rasio efektivitas, digunakan untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengevaluasi kinerja dan efisiensi dan regresi data panel, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dinamika waktu dan variasi antara unit-unit. Metode ini mengatasi masalah heterogenitas dan autokorelasi dalam data, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih tepat dan dapat diandalkan.

1. Analisis Tujuan Pertama

Analisis Rasio Efektivitas

Analisis rasio efektivitas bertujuan untuk melihat seberapa efektif serapan dari anggaran dana desa (DD) di Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2022. perhitungan rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran dan target anggaran.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran dana desa}}{\text{Target anggaran dana desa}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desanya semakin baik. Indikator penilaian efektivitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi pengukuran efektivitas

Nilai Rasio	Kriteria
100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327.
Tahun 1996 dalam Susanto (2014)

2. Analisis Tujuan Kedua

Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan data *time series* dengan *cross section*. Data panel adalah data yang diperoleh dari data *cross section* yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu (Tarigan, 2012)

Menurut Baltagi (Gujarati & Dawn, 2008) data panel memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1. Kombinasi observasi *time series* dan *cross section* membuat data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan kolinieritas lebih kecil antara variabel-variabel serta lebih efisien;
2. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, dengan melihat hasil observasi dari *cross section*;
3. Dampak yang secara sederhana tidak dapat dilihat pada data *cross section* murni maupun *time series* murni bisa dideteksi dengan data panel;
4. Data panel dapat memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit dan juga membuat data menjadi berjumlah ribuan unit.

Sedangkan kekurangan dalam menggunakan data panel menurut (Baltagi, 2005) yang pertama yaitu pada data panel memiliki deret waktu (*time series*) yang pendek. Hal ini berarti bahwa argumentasi asimtotik sangat bergantung pada jumlah individu yang cenderung tidak terbatas. Kedua, masalah pada pengumpulan data dan desain data. Permasalahan dapat timbul pada saat

mendesain data survei atau pada manajemen data. Hal ini bias terjadi karena kurangnya kerja sama antara responden maupun pewawancara. Model regresi data panel menurut (Baltagi , 2005) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \alpha + \beta_1 \log(DD)_{1it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IDM_{it}	: Indeks Desa Membangun (variabel dependen)
DD_{it}	: Dana Desa (variabel independen)
i	: Kabupaten/Kota ke-I (data <i>cross section</i>)
t	: Tahun (data <i>time series</i>)
α	: <i>Intercept</i> / Konstanta
β_1	: <i>Slope</i> / koefisien
ε	: <i>Error Term</i> (faktor kesalahan)
\log	: Operasi logaritma

a. Estimasi Model Data Panel

Untuk menentukan model estimasi terbaik dalam analisis data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, antara lain:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam data panel karena hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa jika perilaku dan individu sama dalam berbagai kurun waktu. Dalam metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil dalam mengestimasi model data panel (Widarjono, 2005). Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \alpha + \beta_1 \log(DD)_{1it} + u_{it}$$

Keterangan:

IDM_{it}	: Indeks Desa Membangun (variabel dependen)
DD_{it}	: Dana Desa (variabel independen)
i	: Kabupaten/Kota ke-I (data <i>cross section</i>)
t	: Tahun (data <i>time series</i>)
α	: <i>Intercept</i> / Konstanta
β_1	: <i>Slope</i> / koefisien
u	: <i>Error Term</i> (faktor kesalahan)
\log	: Operasi logaritma

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model FEM mengasumsikan bahwa intersep pada regresi dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap memiliki karakteristik berbeda. Model ini mengasumsikan bahwa slopanya sama antar waktu maupun individu (Widarjono, 2005). Untuk mengestimasi model ini digunakan variabel *dummy*. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan intersep antar individu. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. *Model fixed effect* menggunakan teknik variabel *dummy* memiliki model regresi sebagai berikut (Gujarati & Dawn, 2008)

$$IDM_{it} = \alpha + \beta_1 DD_{1it} + \beta_2 DD_{2it} + u_{it}$$

Dimana hipotesis pada variabel *dummy* diperoleh nilai 1 untuk *cross section* yang diteliti, sedangkan nilai 0 untuk unit *cross section* lainnya.

Penggunaan model *Least Square Dummy Variable (LSDV)* memiliki beberapa kelemahan atau permasalahan yang perlu diperhatikan (Gujarati & Dawn, 2008):

- a. Apabila terlalu banyak menggunakan variabel *dummy*, maka akan memiliki masalah pada *degree of freedom* yaitu ketika kekurangan observasi untuk dapat melakukan analisis statistik yang bermakna.
- b. Banyaknya penggunaan variabel *dummy* dalam model individual atau interval dapat menyebabkan multikolinearitas.
- c. Dalam situasi tertentu *Least Square Dummy Variable (LSDV)* mungkin akan sulit dalam mengidentifikasi dampak dari variabel *time-invariant*.
- d. Adanya kemungkinan korelasi diantara komponen residual spesifik.

3. *Random Effect Model (REM)*

Dalam metode *Random Effect (REM)* mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar individu dan antar waktu. Untuk menjelaskan *Random Effect* tersebut diasumsikan bahwa setiap individu mempunyai intersep yang berbeda. Model ini sangat berguna apabila individu atau objek yang akan dijadikan sampel dipilih secara *random* atau acak serta merupakan wakil dari populasi (Widarjono, 2005). Secara umum memiliki persamaan sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 DD_{1it} + u_{it}$$

Beberapa asumsi pada model REM adalah β_{0i} merupakan variabel *random*, sehingga intersep masing-masing unit *cross section* dapat dinyatakan sebagai berikut (Gujarati & Dawn, 2008):

$$\beta_{0i} = +\beta_1 \varepsilon_i$$

dimana ε_i adalah error term dengan nilai rata-rata 0 dan varian σ_ε^2 . Substitusi dari kedua persamaan diatas akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$IDM_{it} = (\beta_0 + \varepsilon_i) + \beta_1 DD_{1it} + u_{it}$$

$$IDM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{1it} + (u_{it} + \varepsilon_i)$$

$$IDM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{1it} + w_{it}$$

Keterangan:

w_{it} : $u_{it} + \varepsilon_{it}$

ε_{it} : komponen *error* dari data *cross-section*

u_{it} : kombinasi komponen *cross-section* dan *time series*

Masing-masing komponen *error* tersebut tidak berkorelasi satu sama lain serta tidak berkorelasi antar unit *cross section* dan *time series*. Apabila dalam persamaan REM untuk $\beta_{0i} = \beta_i + \varepsilon_i$ terdapat korelasi antar residual maka metode OLS tidak lagi dapat digunakan untuk mendapatkan estimasi yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi adalah *Gerald Least Square* (GLS) (Gujarati & Dawn, 2008).

b. Pemilihan Model Data Panel

Untuk menentukan model terbaik maka dilakukan beberapa uji yaitu uji *Chow* dan uji *Hausman*.

1. Uji *Chow* (uji *likelihood*)

Uji *Chow* adalah uji yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect* dengan *Common/Pooled Effect*. Uji *Chow* mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

a) Formulasi Hipotesis

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_A : *Fixed Effect Model* (FEM)

- b) Menentukan tingkat signifikansi (α)
- c) Menentukan kriteria pengujian
 H_0 : diterima apabila $p - value > \alpha$
 H_0 : ditolak apabila $p - value \leq \alpha$
- d) Kesimpulan
 Apabila $p - value > \alpha$, maka H_0 diterima sehingga model yang terpilih *Common Effect*, sedangkan apabila $p - value \leq \alpha$, maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Berikut langkah-langkah hipotesis dalam menentukan uji *Hausman* sebagai berikut:

- a) Formulasi Hipotesis
 H_0 : *Random Effect Model* (REM)
 H_A : *Fixed Effect Model* (FEM)
- b) Menentukan tingkat signifikansi (α)
- c) Menentukan kriteria pengujian
 H_0 : diterima apabila $p - value > \alpha$
 H_0 : ditolak apabila $p - value \leq \alpha$
- e) Kesimpulan
 Apabila $p - value > \alpha$, maka H_0 diterima sehingga model yang dipilih *Random Effect*, sedangkan apabila $p - value \leq \alpha$, maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih *Fixed Effect*.

c. Uji Kebaikan Model

Uji kebaikan model dapat dilakukan melalui dua cara yakni, uji signifikansi koefisien regresi secara simultan atau uji eksistensi model dengan menggunakan uji F , serta interpretasi koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi merupakan pengukuran yang menjelaskan sebuah datanya (*goodness of fit*), yaitu menunjukkan perbandingan dari variasi nilai variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independen dalam model (Widarjono, 2005).

1. Uji Eksistensi Model (Uji F)

Uji F atau uji simultan ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan ialah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikan-nya. Apabila nilai probabilitas signifikannya $< 5\%$ maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji F ialah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai F hitung $< F$ tabel dan jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05(\alpha)$, maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. Apabila nilai F hitung $> F$ tabel dan jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari $0,05(\alpha)$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan adalah pengukuran kebaikan (*goodness of fit*) dari garis regresi terhadap data yang digunakan pada penelitian). R^2 menjelaskan berapa presentase dari total variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Nilai R^2 yang mendekati 0 berarti bahwa variabel independen kurang baik dalam menjelaskan variabel dependen. (Widarjono, 2005).

3. Uji Validasi Pengaruh (Uji t)

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel independen secara parsial terhadap variasi variabel dependen. Adapun dasar pengambilan kesimpulan uji t adalah sebagai berikut:

Apabila nilai t hitung $< t$ tabel dan jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05 (\alpha)$,

- a. maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara parsial (individual) tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- b. Apabila nilai t hitung $>$ t tabel dan jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05(\alpha)$, maka H_0 ditolak, artinya variable independen secara parsial (individual) mempengaruhi variable dependen secara signifikan.

3. Analisis Tujuan Ketiga

Analisis Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu bisa fokus penelitian dan sesuai dengan fakta dilapangan sebagaimana jenis metode penelitian data kualitatif tersebut. Selain itu juga landasan teori bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran yang umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang

Menurut sejarah kebudayaan serta perdagangan di Nusantara, Tulang Bawang digambarkan sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang berkata keberadaan kerajaan ini, tetapi catatan Cina antik menjelaskan di pertengahan abad ke-4 seseorang peziarah kepercayaan Budha yang bernama Fa-Hien, dalam perjalanannya menuju India pernah singgah disebuah kerajaan yang makmur serta berjaya, To-Lang P'o-Hwang (Tulang Bawang) di pedalaman Chryse (pulau emas Sumatera). sampai saat ini belum terdapat yang bisa memastikan sentra kerajaan Tulang Bawang, tetapi ahli sejarah Dr. J.W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) sekitar pada radius 20 km berasal sentra kota Menggala. Seiring dengan semakin berkembangnya kerajaan Che-Li-P'o Chie (Sriwijaya), nama dan kebesaran Tulang Bawang bertahap semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah tentang perkembangan kerajaan ini.

Ketika Islam mulai tersebar di wilayah Nusantara pada abad ke-15, perdagangan di Menggala dan alur sungai Tulang Bawang yang sebelumnya ramai dengan berbagai jenis komoditas, kembali menarik perhatian dari Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya yaitu Lada Hitam, memberikan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi homogen yang didapat VOC dari

Bandar Banten. Pertumbuhan perdagangan yang terus meningkat menyebabkan aktivitas di sepanjang Sungai Tulang Bawang semakin ramai dan dinamis. dan dimasa itu kota Menggala dijadikan dermaga “BOOM“, kawasan bersandarnya kapal kapal asal berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura. Perkembangan politik Pemerintahan Belanda yang terus berubah, membawa dampak dengan ditetapkanya Lampung berada dibawah supervisi eksklusif Gubernur Jenderal Herman Wiliam Deandles mulai tanggal 22 November 1808. Hal ini berimbas pada penataan sistem pemerintahan tata cara yang adalah salah satu upaya Belanda untuk menerima simpati warga.

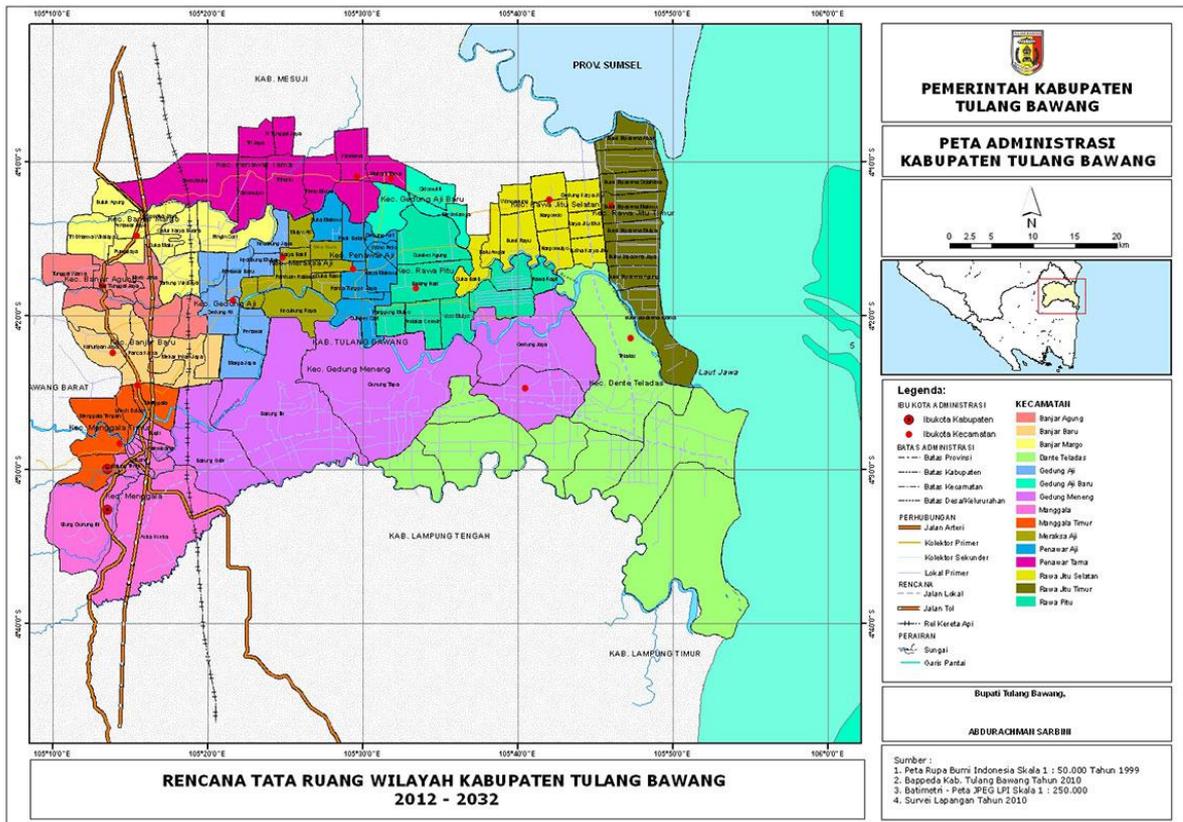
Sistem pemerintahan mulai diatur secara lebih terstruktur, yang menghasilkan pembentukan Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh seorang ketua Marga, yang disebut Kebuayan. Wilayah Tulang Bawang dibagi menjadi tiga wilayah kebudayaan: Buay Bulan, Buay Tegamoan, dan Buay Umpu (pada tahun 1914, kemudian diikuti dengan pembentukan Buay Aji). Sistem Pemerintahan Marga tak berjalan lama, dan ditahun 1864 berdasarkan pada Keputusan Keresiden Lampung Nomor 362/12 tanggal 31 Mei 1864, dibuat sistem Pemerintahan Pesirah. Semenjak itu pembangunan banyak sekali fasilitas guna kepentingan kolonial Belanda mulai dilakukan termasuk di Kabupaten Tulang Bawang. Pada masa pendudukan Jepang, sedikit perubahan yang terjadi di wilayah yang disebut sebagai "Sai Bumi Nengah Nyappur" ini, dan setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, saat Lampung ditetapkan sebagai daerah Keresidenan di Provinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan sebagai daerah Kewedanaan. Seiring dengan perkembangan Negara Republik Indonesia, ketika Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan membentuk Provinsi Lampung, status Menggala diubah menjadi kecamatan di bawah Kabupaten Lampung Utara. Proses berdirinya Kabupaten Tulang Bawang tak begitu saja terjadi. Diawali dari rencana sesepuh serta tokoh masyarakat beserta pemerintah yang dari tahun 1972 merencanakan membagi Provinsi Lampung menjadi 10 Kabupaten/Kota, maka di tahun 1981, Pemerintah Provinsi menghasilkan 8 lembaga Pembantu Bupati, yang salah satunya Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Menggala, berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri

Nomor 821.26/502 tanggal 8 Juni 1981 wacana Pembentukan wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara wilayah Provinsi Lampung. Di tahun 1997, dibentuklah Sekretariat Persiapan Kabupaten Tulang Bawang, menggunakan Sekretaris merangkap Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, SH. Selanjutnya untuk memuluskan pembentukan kabupaten, ditunjuklah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.dua/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 perihal Penunjukan Plt. Bupati Kabupaten taraf II Persiapan Tulang Bawang. Melalui serangkaian proses yang cukup panjang, akhirnya Kabupaten Tulang Bawang lahir dengan ibukota pemerintahan di Menggala, serta diresmikan keberadaannya oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997, sebagai tindak lanjut ditetapkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 perihal pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang serta Kabupaten wilayah tingkat II Tanggamus.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu dari 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Sejak dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2008 perihal Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2008 perihal Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka terjadi pemekaran 2 (dua) daerah otonomi baru, dan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten Induk. Batas wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Mesuji, Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa dan Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 Kecamatan, 147 kampung dan 4 kelurahan. Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 3 Peta administratif Kabupaten Tulang Bawang

Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalah 3.466,32 km². Kecamatan Dente Teladas merupakan kecamatan terluas dengan luas 685,65 Km² atau 19,78 persen dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Meraksa Aji dengan luas 94,71 Km² atau 2,73 persen dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dengan jumlah kampung/kelurahan sebanyak 147 kampung dan 4 kelurahan, 828 Rukun Warga (RW) serta 3.277 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 5. Wilayah Administrasi Kabupaten Tulang Bawang

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Ibukota
1	Banjar Agung	230,88	6,66	11	Banjar Agung
2	Banjar Margo	132,95	3,84	12	Agung Dalem
3	Gedung Aji	114,47	3,30	10	Gedung Aji
4	Penawar Aji	104,45	3,01	9	Gedung Rejo Sakti
5	Meraksa Aji	94,71	2,73	8	Paduan Rajawali
6	Menggala	344,00	9,92	9	Ujung Gunung
7	Penawartama	210,53	6,07	14	Bogatama
8	Rawajitu Selatan	123,94	3,58	9	Medasari
9	Gedung Meneng	657,07	18,96	11	Gedung Meneng
10	Rawajitu Timur	176,65	5,10	8	Bumi Dipasena Mulya
11	Rawa Pitu	169,18	4,88	9	Batanghari
12	Gedung Aji Baru	95,36	2,75	9	Sidomukti
13	Dente Teladas	685,65	19,78	12	Teladas
14	Banjar Baru	132,95	3,84	10	Kahuripan Jaya
15	Menggala Timur	193,53	5,58	10	Lebuh Dalem
Kabupaten Tulang Bawang		3.466,32	100,00	151	Menggala

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka 2017

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang terletak antara posisi 04°08' sampai 04°41' Lintang Selatan dan 105°09' sampai 105° 55' Bujur Timur, yang terletak dibagian hilir dari dua sungai besar yaitu Way Mesuji dan Way Tulang Bawang dan bermuara di Laut Jawa yang berada di bagian timur wilayah Tulang Bawang. Mengingat letaknya yang berada di antara 0 – 10° Lintang Selatan maka Kabupaten Tulang Bawang seperti halnya daerah - daerah lain di Indonesia juga merupakan daerah beriklim tropis.

a. Topografi

Dilihat dari topografi, Kabupaten Tulang Bawang dibagi menjadi 4 (empat) daerah yaitu:

1. Daerah dataran (landai), adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang, berada pada kemiringan antar 15% - 30% yang dapat dimanfaatkan area pertanian, perkebunan serta cadangan pengembangan transmigrasi.
2. Daerah rawa, daerah rawa di Kabupaten Tulang Bawang terdapat di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0-1 m yang merupakan muara dari Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Rawa - rawa tersebut terdapat di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan serta Kecamatan Dente Teladas. Daerah - daerah tersebut merupakan areal yang cukup produktif untuk pengembangan budidaya tambak dan perikanan laut.
3. Daerah River Basin, Kabupaten Tulang Bawang memiliki 2 River Basin yang utama yaitu River Basin Tulang Bawang dan River Basin sungai - sungai kecil lainnya. Daerah ini berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa - rawa atau lebung - lebung. Pada areal River Basin Way Tulang Bawang dengan anak - anak sungainya membentuk pola aliran dendritic dengan luas 10.150 Km² serta memiliki panjang 753 Km yang digunakan untuk pengembangan tambak udang.
4. Daerah alluvial, meliputi pantai sebelah Timur yang merupakan bagian hilir (*down steem*) dari sungai - sungai besar yaitu Way Tulang Bawang dan Way Mesuji yang dimanfaatkan untuk pelabuhan dan areal persawahan pasang surut.

b. Demografi

Demografi memiliki berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk menjadi salah satu aset dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pergerakan penduduk yang terdiri dari besaran, komposisi, dan distribusi penduduk memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan struktur ruang. Dalam proses pembangunan penduduk merupakan target utama yang akan dituju, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisa kependudukan yang menyangkut permasalahan perubahan

keadaan penduduk seperti kelahiran, kematian, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, proyeksi jumlah penduduk dan perkembangan penduduk sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang, pada hasil data BPS Kabupaten Tulang Bawang 2024 adalah 433.570 Jiwa memiliki pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sekitar 0,99% per tahun, dan tingkat kepadatan sekitar 125,08 jiwa/km². Permasalahan kependudukan yang terdiri dari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan pada proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang meliputi beberapa Kawasan antara lain:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas \pm 4.000 Ha meliputi Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawartama, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Menggala Timur.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian merupakan kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi persyaratan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
3. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas \pm 41.800 Ha meliputi:
 - a. Tanaman pangan pada lahan basah dengan luas \pm 32.889 Ha dengan

kawasan sentra meliputi Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Penawar Aji.

- b. Tanaman pangan pada lahan kering dengan luas ± 8.914 Ha dengan kawasan sentra meliputi: Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Meneng.
 - c. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan basah dan lahan kering seluas ± 25.080 Ha di Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawapitu, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Penawar Aji, yang komoditasnya meliputi padi, kedelai, jagung, ketela pohon dan, dan komoditas singkong dengan kawasan sentra terdapat di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji; Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru, dan Kecamatan Menggala Timur.
4. Kawasan Peruntukan Pertanian
Hortikultura Kawasan pertanian hortikultura seluas ± 63.520 Ha dengan kawasan sentra di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Gedung Aji Baru.
 5. Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan perkebunan dengan luas ± 100.978 Ha meliputi:
 - a. Komoditas kelapa sawit dengan kawasan sentra di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawapitu, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan

- Banjar Baru dan Kecamatan Gedung Meneng;
- b. Komoditas tebu dengan kawasan sentra di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas.
 - c. Komoditas karet dengan kawasan sentra terdapat di kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawartama, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru; dan
 - d. Komoditas singkong dengan kawasan sentra terdapat di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawartama, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru dan Kecamatan Menggala Timur.
6. Kawasan Peruntukan Peternakan meliputi:
- a. Pengembangan sentra ternak besar berada pada Kecamatan Menggala, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Penawar Tama;
 - b. Pengembangan sentra ternak kecil berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama dan Kecamatan Gedung Aji Baru; dan
 - c. Pengembangan sentra peternakan unggas berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, dan Kecamatan

Rawapitu.

7. Kawasan Peruntukan Perikanan

Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan dasar wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, wilayah pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

- 1) Kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - a. Perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai Way Tulang Bawang terdapat di seluruh wilayah kabupaten dengan jenis komoditas berupa ikan tawar, udang tawar dan kepiting; dan
 - b. Perikanan tangkap di perairan laut terdapat di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas dengan jenis komoditas berupa ikan udang, kerang, dan kepiting.
- 2) Kawasan perikanan budidaya berupa budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas ± 29.910 Ha berada pada seluruh kecamatan disepanjang aliran sungai Way Tulang Bawang.
- 3) Kawasan pengolahan perikanan dikembangkan di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.
- 4) Kawasan minapolitan berada di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kawasan Dente Teladas dengan komoditas unggulan udang windu dan vanname.
- 5) Prasarana perikanan meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas dan Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI) di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur;
- 6) Tempat Pelelangan Ikan di Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas; dan
- 7) Balai Benih Ikan di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur.

8. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tulang Bawang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara.

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi berada di wilayah timur Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara meliputi:
 - 1) Pertambangan Pasir di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan dengan luas \pm 25.278 Ha; dan termasuk pengelolaan wilayah laut Kabupaten Tulang Bawang 0-4 mil, dan
 - 2) Pertambangan batubara di Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Rawa Jitu Selatan.

9. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tulang Bawang meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.

- a. Kawasan peruntukan industri - industri besar berada di Kecamatan Dente Teladas, Gedung Meneng, dan Menggala Timur.
- b. Kawasan peruntukan industri - industri sedang meliputi sentra - sentra penghasil gula, tapioca, CPO, latex, tambak udang berada di Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Penawar Tama.

10. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya, dan kawasan wisata buatan.

- a. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - 1) Kawasan ekosistem essensial perlindungan satwa Rawa Pacing dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Aji; Rawa Rantau Kandis dan Rawa Lambu Purus di Kecamatan Menggala;
 - 2) Pantai Rawajitu Timur di Kecamatan Rawajitu Timur; Pantai Kuala Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - 3) Rawa Bujung Tenuk di Kecamatan Menggala; Bawang Latak di Kecamatan Menggala;
 - 4) Rawa Cakat di Kecamatan Menggala;
 - 5) Pulau Daging di Kecamatan Menggala; dan
 - 6) Tangga Raja di Kecamatan Menggala dan Gedung Aji.
- b. Kawasan wisata budaya meliputi:
 - 1) Permukiman adat asli (rumah adat) di Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Menggala Timur;
 - 2) Makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan
 - 3) Kawasan sejarah (Tangga Raja) di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.
- c. Kawasan wisata buatan berupa wisata terpadu Cakat Nyenyik dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur.

11. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan luas ± 13.731 Ha meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1) Kawasan permukiman perkotaan Menggala di Kecamatan Menggala;

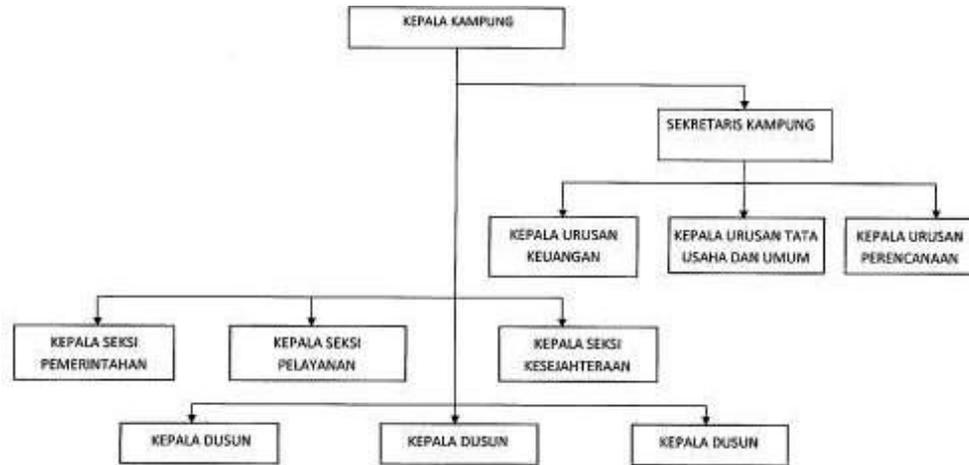
- 2) Kawasan permukiman Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kecamatan Banjar Agung;
 - 3) Kawasan permukiman Perkotaan Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - 4) Kawasan permukiman Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu;
 - 5) Kawasan permukiman Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu Selatan;
 - 6) Kawasan permukiman Perkotaan Bumi Dipasena Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur;
 - 7) Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Aji di Kecamatan Gedung Aji;
 - 8) Kawasan permukiman Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa Aji;
 - 9) Kawasan permukiman Perkotaan Bogatama di Kecamatan PenawarTama;
 - 10) Kawasan permukiman Perkotaan Sidomukti di Kecamatan Gedung Aji Baru;
 - 11) Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng;
 - 12) Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan Penawar Aji;
 - 13) Kawasan permukiman Perkotaan Agung Dalem di Kecamatan Banjar Margo;
 - 14) Kawasan permukiman Perkotaan Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru; dan
 - 15) Kawasan permukiman Perkotaan Lebu Dalem di KecamatanMenggala Timur.
- b. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten Tulang Bawang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

C. Organisasi Pemerintah Desa

Desa merupakan struktur organisasi pemerintahan yang paling rendah yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dimana masyarakat dapat menyampaikan keinginan mereka terkait tujuan yang diinginkan untuk diwujudkan dalam wilayah mereka sehingga secara tidak langsung masyarakatlah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan mereka.

Pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat berupa nilai - nilai kearifan lokal, sosial dan budaya serta kehidupan gotong royong. Kehidupan modal sosial tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, diperlukan aparatur desa yang mampu dan memiliki kapasitas dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

Di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 147 kampung/desa yang aparatur pemerintahannya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur tata usaha dan umum, Kaur perencanaan, Kaur keuangan, Kasi pemerintahan dan Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan. Aparatur desa inilah yang menjadi pelayan masyarakat yang setiap jabatannya memiliki tugas dan tanggung jawab masing - masing. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa/Kampung di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat di gambar 5.



Gambar 4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Tulang Bawang

Pemerintah Desa mengelola keuangan desa berupa dana desa yang dialokasikan dari APBN diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBDKab/Kota yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang besarnya memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan. Setiap desa/kampung di Kabupaten Tulang Bawang telah dialokasikan dana desa. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemerintah desa untuk maju dan mandiri.

D. Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah

Dana Desa adalah sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsi masing-masing terutama fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selengkapnya total penerimaan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang per-Kecamatan dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Penerimaan dana desa di Kabupaten Tulang Bawang

No	NAMA KECAMATAN	Nilai Anggaran Dana Desa (DD)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	BANJAR AGUNG	Rp6.855.044.023	Rp8.732.901.335	Rp8.367.125.717	Rp8.772.929.179	Rp8.716.674.000	Rp9.091.625.000	Rp10.415.574.000
2	BANJAR MARGO	Rp7.480.749.404	Rp9.530.017.715	Rp9.191.975.556	Rp10.447.188.732	Rp10.312.630.000	Rp10.281.069.000	Rp11.298.882.000
3	MENGGALA	Rp3.191.314.038	Rp4.065.730.635	Rp4.404.548.666	Rp4.314.790.469	Rp4.319.240.000	Rp4.917.552.000	Rp4.609.579.000
4	RAWAJITU TIMUR	Rp4.956.722.032	Rp6.314.482.610	Rp6.423.782.841	Rp6.661.216.142	Rp6.899.188.000	Rp7.692.139.000	Rp6.302.973.000
5	BANJAR BARU	Rp6.079.539.891	Rp7.744.564.556	Rp7.416.799.480	Rp7.750.424.052	Rp7.847.244.000	Rp8.209.529.000	Rp7.374.495.000
6	PENAWAR AJI	Rp5.573.412.171	Rp7.100.090.893	Rp6.956.640.447	Rp7.447.360.956	Rp7.438.845.000	Rp7.457.995.000	Rp7.328.107.000
7	RAWAJITU SELATAN	Rp5.726.543.011	Rp7.295.564.756	Rp8.027.205.975	Rp8.298.494.910	Rp8.469.569.000	Rp8.172.391.000	Rp7.593.261.000
8	GEDUNG AJI	Rp6.203.688.177	Rp7.903.041.744	Rp8.471.728.188	Rp8.245.982.334	Rp8.730.869.000	Rp8.203.901.000	Rp8.479.554.000
9	PENAWAR TAMA	Rp8.647.703.810	Rp11.016.440.642	Rp11.297.741.116	Rp11.221.238.734	Rp11.475.110.000	Rp11.805.748.000	Rp11.297.814.000
10	GEDUNG AJI BARU	Rp5.794.947.733	Rp7.382.884.436	Rp8.792.443.920	Rp7.490.578.546	Rp7.604.671.000	Rp8.127.413.000	Rp7.786.611.000

Tabel 6 Lanjutan

No	NAMA KECAMATAN	Nilai Anggaran Dana Desa (DD)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	MERAKSA AJI	Rp4.927.324.299	Rp6.276.955.951	Rp6.320.742.072	Rp7.357.763.519	Rp7.126.162.000	Rp7.173.377.000	Rp7.118.395.000
12	DENTE TELADAS	Rp8.295.029.005	Rp10.569.458.089	Rp13.249.876.469	Rp13.996.726.071	Rp13.675.597.000	Rp13.705.428.000	Rp12.828.028.000
13	MENGGALA TIMUR	Rp6.256.285.858	Rp7.970.183.503	Rp9.298.616.491	Rp9.034.575.201	Rp8.983.819.000	Rp9.023.002.000	Rp8.254.713.000
14	RAWA PITU	Rp5.645.036.519	Rp7.191.520.471	Rp7.620.195.131	Rp8.724.364.813	Rp8.216.979.000	Rp8.114.209.000	Rp7.532.442.000
15	GEDUNG MENENG	Rp7.399.496.029	Rp9.427.902.664	Rp12.170.686.931	Rp13.160.548.342	Rp3.460.309.000	Rp13.395.136.000	Rp11.386.921.000
Total		Rp93.032.838.016	Rp118.521.742.017	Rp128.010.111.018	Rp132.924.184.019	Rp123.276.908.020	Rp135.370.516.021	Rp129.607.351.022

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang

Tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan penghitungan rincian dana desa setiap desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan setiap tahun. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
2. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Prioritas penggunaan dana desa dari tahun 2016 hingga 2022 berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTTTrans) setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Prioritas penggunaan dana desa

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa
2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Infrastruktur Desa: Jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas sanitasi. 2. Pengembangan Ekonomi Desa: Pembangunan pasar desa, usaha ekonomi produktif. 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa.
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: Kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak usia dini.

Tabel 7 Lanjutan

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan Infrastruktur Dasar: Jalan, irigasi, air bersih, dan sanitasi. 3. Pemberdayaan Masyarakat: Pengembangan ekonomi desa, penguatan BUMDes.
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Infrastruktur Desa: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa. 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan. 3. Peningkatan Ketahanan Pangan: Pertanian, perikanan, peternakan.
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia: Pencegahan stunting, pelayanan kesehatan. 2. Pengembangan Ekonomi Lokal: BUMDes, UMKM, pariwisata desa. 3. Pembangunan Infrastruktur Dasar: Jalan desa, jembatan, sanitasi, air bersih.
2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia: Pencegahan stunting, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan. 2. Pengembangan Ekonomi Desa: Pengembangan usaha ekonomi produktif, pariwisata desa. 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. 4. Ketahanan Pangan dan Penanganan Bencana: Program ketahanan pangan, penanganan bencana alam. 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Penguatan lembaga kemasyarakatan desa, pelatihan dan pendidikan masyarakat. 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pengelolaan dan pelestarian lingkungan. 7. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Peningkatan akses informasi, sistem informasi desa.
2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Ekonomi Nasional: Perlindungan sosial, penanganan pandemi COVID-19. 2. Pengembangan Ekonomi Lokal: Dukungan BUMDes, pengembangan usaha produktif. 3. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, pengelolaan air bersih dan sanitasi.
2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Ekonomi Nasional: Perlindungan sosial, penanganan pandemi COVID-19. 2. Pengembangan Ekonomi Desa: Pengembangan usaha produktif, BUMDes. 3. Pembangunan Infrastruktur Dasar: Jalan desa, jembatan, irigasi, air bersih, dan sanitasi. 4. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia: Pencegahan stunting, pendidikan, dan kesehatan. 5. Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan dan pendidikan, penguatan lembaga kemasyarakatan desa.

Prioritas penggunaan dana desa dari tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan fokus yang konsisten pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional juga menjadi prioritas penting pada tahun 2020 dan 2021.

Pemerintah daerah dapat menentukan prioritas penggunaan dana desa dengan menyeimbangkan antara arahan pemerintah pusat dan kebutuhan spesifik setiap desa melalui pendekatan yang sistematis dan partisipatif. Langkah pertama adalah memahami kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu melakukan *assessment* kebutuhan setiap desa melalui musyawarah desa (Musdes) dan mengumpulkan data kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi publik dan Musrenbangdes, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan lokal yang mendesak. Setelah itu, harmonisasi dilakukan dengan menggabungkan prioritas pusat dan lokal, menciptakan peta prioritas bersama berdasarkan urgensi dan dampaknya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) disusun untuk mencakup program-program yang telah disinkronisasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim pengawas yang melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana. Transparansi informasi dan pelaporan berkala juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses ini. Dengan pendekatan ini, penggunaan dana desa dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arahan pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki skala prioritas dalam pemanfaatan maupun penggunaan dana desa. Anggaran dana desa pada awal bergulirnya, pemanfaatannya fokus terhadap peningkatan

pemberdayaan dan pembangunan di desa. Sedangkan untuk tahun 2017-2019, kebijakan pemanfaatandana desa dititikberatkan pada 4 bidang pembangunan prioritas, yaitu pembangunan embung, pembangunan sarana olahraga desa, peningkatan produk unggulan kawasan pedesaan (PRUKADES) dan pemberdayaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Dana desa di tahun 2020-2022 di fokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat dilibatkan dalam hal mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pembangunan karena masyarakat sebagai pelaksananya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang masih dalam kategori cukup. Hal ini terlihat dari mulai terlibatnya perwakilan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Namun masih banyak juga masyarakat yang cenderung pasif.

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dan untuk memperkuat data dan pemahaman terkait penelitian yang diambil, maka peneliti dalam hal ini mengambil contoh studi kasus di Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama terkait pengimplementasian kebijakan dana desa yang baik yang didukung oleh partisipasi masyarakat serta kinerja aparat desa yang

baik dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif. Dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang adalah membangun embung yang dijadikan sebagai tempat wisata yang pembangunannya memanfaatkan adanya anggaran dana desa. Pengelolaan wisata embung ini melibatkan masyarakat sekitar dan BUMDes.

Hal ini merupakan terobosan dan inovasi yang baik bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa juga untuk membantu meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar embung dimana masyarakat khususnya ibu-ibu dapat berjualan di sekitar area wisata sedangkan untuk para lelaki dan pemuda dapat menyewakan lahan parkir dan wahana permainan air seperti perahu dan pemancingan. Hal ini merupakan wujud nyata pengelolaan dana desa yang baik yang tentunya didukung oleh partisipasi masyarakat untuk dapat membangun desanya serta adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar masyarakat dan perangkat desa.

Pembangunan desa adalah sebuah perjalanan panjang menuju peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Narasi tentang pembangunan desa seringkali dimulai dari gambaran tentang kondisi awal desa yang mungkin menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar yang terbatas, dan rendahnya tingkat ekonomi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, pembangunan desa mencerminkan semangat dan upaya bersama dalam menciptakan perubahan positif. Melalui inisiatif warga lokal, dukungan dari pemerintah daerah, serta keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, semua pihak bekerja sama untuk mengembangkan desa menjadi lingkungan yang lebih maju.

Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat desa didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan,

sehingga program-program yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Melalui berbagai program pembangunan seperti dana desa, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta upaya perlindungan lingkungan, pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan memberdayakan semua lapisan masyarakat.

Setiap langkah dalam pembangunan desa merupakan bagian dari cerita perubahan yang melibatkan kerja keras, kesabaran, dan kolaborasi antar berbagai pihak. Dengan semangat gotong royong dan tekad yang kuat, pembangunan desa menjadi sebuah narasi tentang transformasi yang membawa harapan dan kesempatan bagi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian yaitu :

1. Kinerja keuangan dalam rasio aktivitas dana desa yang telah dicapai Kabupaten Tulang Bawang dari tahun anggaran 2016-2022 dengan rata-rata 99,41% menandakan tingkat efektivitas yang sangat tinggi namun Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan transparan.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tulang Bawang. Semakin besar dana desa maka semakin besar kenaikan angka IDM.
3. Dana desa memiliki dampak positif terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang. Dana desa telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya merupakan salah satu dampak utama dari penggunaan dana desa. Infrastruktur yang dibangun telah meningkatkan konektivitas antarwilayah, aksesibilitas terhadap layanan publik, dan memperkuat ekonomi lokal. Dana desa juga telah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan koperasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak potensi desa yang belum digali secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan

upaya dari Pemerintah Desa untuk lebih proaktif dalam menggali potensi-potensi tersebut dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar relevan dengan kondisi lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka disarankan kepada:

1. Pemerintah Desa, diharapkan untuk menggali potensi-potensi desa yang belum optimal dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah desa juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mendapatkan dukungan dan inovasi dalam program pembangunan.
2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, diharapkan untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut benar-benar digunakan secara efektif dan transparan. Selain itu, penting untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah desa yang berperan sebagai ujung tombak dan paling dekat dengan masyarakat, memahami kebutuhan dan potensi lokal secara mendalam sehingga program-program pembangunan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
3. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mempertimbangkan penambahan variabel yang berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) seperti Alokasi Dana Desa (ADD) atau mengembangkan variabel penelitian dari tingkat kecamatan menjadi ke tingkat desa dan melakukan Analisa lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat perkembangan setiap wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antlöv, W. H., & Dharmawan, L. 2016. *Village Governance, Community Life, and The 2014 Village Law in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies.
- Antloy, H. 2002. *Negara Dalam Desa*. Yogyakarta: LAPPERA.
- Arfiansyah, M. A. 2020. Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 01, No. 01*. 2020: STAI Wonogiri.
- Arina, A. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. 2021. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Manado, Vol 22, No.3*. 2021: UNSRAT.
- Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Baltagi , B. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data* (3 ed.). England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185-205.
- Dewi, S. S. 2021. *Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Klaten*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2016. *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2016*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. 806 hal.

- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2018. *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2018*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. 758 hal.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2019. *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2019*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. 225 hal.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2020. *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2020*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. 871 hal.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2021. *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2021*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. 769 hal.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2022. *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2022*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. 3250 hal.
- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayati, W., & Seminar, A. U. 2022. Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: pendekatan teori kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia Vol 37, No 1 (2023) : 48-55*: UGM.
- Gujarati, D. N., & Dawn, P. C. 2008. *Basic Econometric (fifth edition)*. New York: MCGraw-Hill Inc.
- Hadiwibowo, Y., Dokhi, M., Hidayat, R. T., & Johantri, B. 2022. Peran Desa Dalam Perekonomian: Analisis Hubungan Indeks Desa Membangun, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) X Tahun 2022*: Politeknik Negeri Malang

- Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Mulyani, S. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Munir. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi*. NTB: Bappeda.
- Muta'Ali. 2015. *Pengembangan Kawasan Strategi Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muta'Ali. 2016. *Pengembangan Wilayah Perdesaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Palwadi, D., Simangunsong, F., Lukman, S., & Fatoni, A. (2022). *The Influence of Village Fund Policy Implementation, Community Participation and Organizational Performance on the Effectiveness of Village Development in Tulang Bawang District of Lampung Province*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(2), 8787-8798.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022
- Ridhwani, I. 2020. *Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Tesis: IAIN PONOROGO.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. SAGE Publications.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat.
- Sari, D. P. 2020. *Hubungan Program Pembangunan Perdesaan Melalui Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. 2017. *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 15, No.1: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: Goals, Dimensions, Myths and Challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. 2020. Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 4, No.3*: Ekuitas.
- Sukirno, S. 2011. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susanto, Hery. 2014. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Seminar nasional*: Universitas Terbuka.

Tangkuhamat, F. V., Penelewen, V. V., & Mirah, A. D. 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agri-Sosioekonomi: Universitas Sam Ratulangi*.

Tarigan, R. 2012. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (edisi pertama)*. Yogyakarta: Ekonisia.